

BAB 4 RELASI KEKUASAAN DAN RESPON TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN

JAKARTA BERGERAK LEBIH PAGI

Lima Januari
Dua ribu sembilan menguak hari
Jakarta bergerak lebih pagi
Seragam putih-putih siap berlari

Lima Januari
Barisan helm menyibak kabut
Seragam putih-putih tunggu antar jemput

Hari ini
Lima Januari
Kubangun lebih dini
Dikala dingin menusuk sendi

Kemarin jalan ini lengang
Kemarin ku nyaman melenggang
Pagi ini
Tidak kosong di semua sisi

Hari ini
Lima Januari
Jakarta bergerak lebih pagi
Seragam putih-putih siap berlari



Gambar 4.1. Bunda Tumiyem SPd, Kepala Sekolah Lebak Bulus 06

Puisi di atas adalah buah karya kepala sekolah SD Inklusi Lebak Bulus 06. Puisi itu mengingatkan saya pada perubahan jadwal masuk sekolah yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Januari 2009 yakni yang tadinya masuk pukul 07.00 pagi menjadi pukul 06.30 pagi. Namun

dalam bab ini saya bukan hanya membicarakan perubahan jadwal masuk sekolah saja melainkan akan dideskripsi tentang relasi kekuasaan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pendidikan beserta implikasinya yaitu kebijakan tentang sekolah gratis dimana sekolah tidak boleh memungut uang untuk pendanaan biaya operasional sekolah dari orang tua siswa. Perubahan kurikulum yang tadinya menggunakan Kurikulum Nasional 2004 menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang harus disusun dan dikembangkan sendiri oleh sekolah, serta pembelajaran ICT yang mulai diselenggarakan di SD Inklusi Lebak Bulus 06.

4.1. Perubahan Jadwal Masuk Sekolah

Puisi buah karya kepala sekolah tadi mengingatkan saya pada suatu kejadian pada tanggal 15 Desember 2008 sebagai berikut;

4.1.1. Sosialisasi Peraturan

Pagi itu tanggal 15 Desember 2008 dari arah kota Depok saya mau berangkat bekerja. Ada suasana yang agak berbeda ketika di Daerah Lenteng Agung saya melihat satu truk polisi. Ketika saya sampai di perempatan TB Simatupang saya juga melihat hal yang sama. Saya bertanya-tanya ada apa, apa yang terjadi? . Keheranan saya bertambah saat memasuki halaman kantor. Banyak Polisi berjaga di gerbang dan di depan aula besar Mitra Nusantara. Saya mulai menyusun jawaban dari pertanyaan saya, bahwa dengan penjagaan seperti itu akan ada kegiatan yang penting di Aula Mitra Nusantara dan yang akan datang adalah seseorang yang dianggap penting dan punya kedudukan tertentu. Tiba-tiba helicopter meraung-raung di atas bangunan kantor, pergi menjauh dan datang lagi seperti sedang mengontrol situasi keamanan untuk kepentingan kelas hegemonik¹³ tertentu. Semua yang saya saksikan ini adalah salah satu pertunjukkan untuk memelihara kelanggengan kekuasaan. Kelanggengan kekuasaan tidak harus di

¹³ Hegemonik merupakan hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lainnya, kelas hegemonik, atau kelompok kelas hegemonik, adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis.

tempuh semata dengan cara-cara kekerasan. Kekuasaan dapat di pertahankan lewat prinsip hegemoni, prinsip yang dalam budaya politik Jawa dimaknai sebagai , lawan menjadi kalah tetapi secara psikis tidak merasa kalah. Penguasa tidak perlu memaksa, mengintimidasi, membunuh atau dengan cara-cara kekerasan lainnya, sebab dengan pola hegemoni ini rakyat sudah takut sebelum melakukan hal-hal yang menyebabkan ia harus dikerasi oleh penguasa.

Teman saya dari arah Jakarta Timur datang bersamaan dengan teman yang datang dari arah Jakarta Pusat. Mereka bertanya pada saya mengapa di jalan di jaga seperti akan ada kegiatan penting. Saya tidak tahu kegiatan apa yang akan berlangsung. Mobil dengan berbagai jenis dan warna memasuki kantor tempat saya bekerja dan memenuhi semua lahan parkir bahkan lapangan volley dan lapangan tenis pun terisi penuh. Saya kemudian bertanya kepada Kepala Sub Bagian Umum tentang kegiatan apa yang akan berlangsung. Pak Midi, Kasubag Umum mengatakan bahwa pagi ini LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) dijadikan tempat untuk sosialisasi perubahan jadwal masuk sekolah yang tadinya masuk jam 07.00 mulai tahun 2009 akan menjadi 06.30. Yang akan hadir untuk mensosialisasikan peraturan baru itu adalah wakil gubernur DKI. Saya dan teman saya barulah mengerti apa yang akan terjadi.

Pukul 09.30 Rombongan wakil gubernur tiba dan memasuki ruang aula Mitra Nusantara, di sana sudah berkumpul, Kasi Dinas Pendidikan dari tiap kecamatan, Koordinator Pengawas Sekolah dari jenjang SD sampai SMA dan sederajat di tiap kecamatan, Ketua KKG (Kelompok Kerja Guru) dan Ketua MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yang ada di seluruh DKI Jakarta. Sebenarnya saya ingin masuk mendengarkan sosialisasi tersebut, namun hanya orang-orang yang mendapat undanganlah yang diperkenankan masuk. Dari instansi tempat saya bekerja hanya Kepala LPMP saja yang diundang.

Belakangan saya mendapatkan berita tentang isi pidato Wakil Gubernur itu dari internet sebagai berikut;

Perubahan jam masuk sekolah dari pukul 07.00 WIB menjadi 06.30 WIB, akan diberlakukan efektif mulai 5 Januari 2009 nanti. Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, Senin (15/12), kepada wartawan, di Gedung Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). "Kebijakan memajukan jam masuk sekolah itu merupakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatur

penggunaan jalur guna meminimalisir kemacetan di pagi hari," papar Wagu Prijanto. Berdasarkan survei yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, lanjut wagub, puncak kemacetan di pagi hari terjadi antara pukul 07.00-09.00 WIB. "Kontribusi sektor pendidikan dalam kemacetan ini mencapai 14 persen," jelas Wagub Prijanto. Prijanto menambahkan, kemacetan di Jakarta jangan dipandang sebagai hal yang biasa. Ini, katanya, sudah jadi hal yang luar biasa. "Jam produktif masyarakat berkurang 2-3 jam akibat kemacetan. Tak ada orang yang ingin kemacetan. Karena itu Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengatasi hal ini," tukas Wagub Prijanto. Selain memajukan jam sekolah, Wagub Prijanto juga mengharapkan agar perusahaan swasta non bank memajukan jam masuk karyawannya. Untuk karyawan swasta di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara diharapkan masuk pukul 07.00 WIB, Jakarta Timur dan Jakarta Barat jam 08.00 WIB, sementara Jakarta Selatan 09.00 WIB. "Untuk kantor pemerintahan karyawannya masuk pukul 07.30 WIB," katanya.



Gambar 4.2. Wakil Gubernur memberikan sosialisasi

Dari sinilah sosialisasi tentang perubahan peraturan jadwal masuk sekolah bagi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah yang ada di wilayah DKI Jakarta bergulir, yang pada awalnya masuk pada pukul 07.00 WIB menjadi 06.30 WIB. Dari sini pula mekanisme kuasa bergerak dari pusat pemerintahan Jakarta pada tataran makro sampai ke tingkat satuan pendidikan pada tataran mikro. Setelah sosialisasi di LPMP selesai maka koordinator pengawas sekolah setiap jenjang pendidikan di tiap kecamatan masing-masing mengumpulkan seluruh pengawas di tiap kecamatan beserta kepala sekolah sesuai dengan jenjangnya masing-masing dalam rapat koordinasi tingkat kecamatan. Kemudian kepala sekolah mengintruksikan kepada seluruh

guru dalam rapat sekolah agar menyampaikan perubahan jadwal tersebut kepada orang tua peserta didik saat pembagian raport.

Inilah hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN Lebak Bulus 06 tentang mekanisme sosialisasi peraturan tentang perubahan jadwal masuk sekolah;

”Pertama kali tahu ada perubahan jadwal masuk sekolah dari Pengawas dalam rapat koordiansi tingkat kec. Cilandak, sebulan sekali memang ada rapat koordinasi untuk kepsek SD, satu kecamatan ada sekitar 54 sekolah SD negeri, bila ditambah swasta ya sekitar 70 sekolah. Setiap habis rapat koordinasi, di SD ini diakhir bulan disampaikan pada guru-guru sekalian refleksi apa yang harus diperbaiki, biasanya hari sabtu. Ketika ambil raport diumumkan pada orang tua murid bahwa nanti 5 Januari 2009 masuk lebih pagi jam 6.30”.

Dalam kasus ini wakil gubernur, kasi pendidikan, koordinator pengawas, pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru-guru adalah sebagai apa yang disebut Foucault *“micro pouvoirs”* atau “gugusan-gugusan kekuasaan lokal yang tersebar”. Melalui “kaki tangan-kaki tangan inilah” kekuasaan itu melakukan reproduksi dan bekerja dalam setiap lapisan sosial.

Dalam perubahan jadwal masuk sekolah ini ada tiga strategi utama lewat mana doktrin dan teori pembangunan dianggap berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan disiplin, yaitu normalisasi mekanisme. Strategi pertama disebut *“inkorporasi progresif problem”*, yaitu teori-teori dan doktrin-doktrin pembangunan memuat problem yang harus disembuhkan, artinya munculnya teori dan doktrin tersebut didahului dengan penciptaan problem pembangunan, yaitu *“abnormalisasi”*, dalam kasus ini isu atau wacana tentang kemacetan di DKI Jakarta diangkat sebagai problem yang harus disembuhkan, sehingga memberikan justifikasi bagi para penentu kebijakan dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta. Strategi kedua disebut *“profesionalisasi pembangunan”*, yaitu problem pembangunan atau abnormalisasi setelah dimasukkan ke dalam domain pembangunan, maka menjadi masalah teknis dan terlepas dari persoalan politis, sehingga dianggap lebih bebas nilai dan merupakan bahan penelitian ilmiah¹⁴.

¹⁴ Menurut Wagub Prijanto di Balaikota Jumat siang (21/11/2008), usai mengadakan rapat pimpinan dengan sejumlah instansi terkait di lingkungan pemprov DKI. Pemprov mengusulkan skenario perubahan jam sekolah dan jam masuk kantor ini, setelah mendapat hasil survey dari PT Pamintori Cipta, lembaga yang memang disewa oleh pemprov. Berdasar hasil surveynya, pada

Dengan demikian problem pembangunan telah diprofesionalisasi melalui kontrol pengetahuan. Strategi ketiga disebut “institusionalisasi pembangunan”, yaitu doktrin-doktrin dan teori-teori pembangunan diberlakukan untuk berbagai level institusi dan kesemua itu merupakan jaringan dimana hubungan baru kekuasaan pengetahuan telah terjalin dengan rapi dan sangat kuat.

Mekanisme perubahan jadwal masuk sekolah menunjukkan bahwa kuasa bukanlah milik melainkan strategi, kuasa tak dapat dilokalisasi tetapi terdapat dimana-mana, kuasa tak selalu bekerja melalui penindasan dan represi tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi, kuasa tak bersifat destruktif melainkan produktif. Kuasa memproduksi realitas; kuasa memproduksi lingkup objek dan ritus-ritus kebenaran.

4.1.2. Implikasi Perubahan Jadwal Masuk

Setiap peraturan baru mempunyai implikasi dalam penerapannya. Perubahan jadwal masuk sekolah di SDN Lebak Bulus 06 mendapatkan respon yang beragam. Bagaimana bisa beradaptasi dengan peraturan baru tersebut tentu saja melahirkan upaya dari aktor-aktor yang terlibat didalamnya untuk menyiasatinya.

4.1.2.1 Implikasi bagi Orang Tua Peserta Didik

Ketika peraturan perubahan jadwal itu disampaikan kepada orang tua peserta didik, banyak juga yang merasa keberatan, berikut penjelasan kepala sekolah;

“Saat ambil raport diumumkan pada orang tua murid bahwa nanti 5 Januari 2009 masuk lebih pagi yakni jam 6.30. Untuk pertama memang banyak yang protes dan komplain, katanya nanti anaknya masih ngantuk dan belum sempat sarapan, tapi saya jelaskan ini sudah peraturan pemerintah daerah”.

tahun 2008 ini di Jakarta setiap hari terjadi 20,7 juta perjalanan. Dari angka itu, 3 persen perjalanan menggunakan kereta, 57 persen menggunakan kendaraan bermotor, 40 persen adalah perjalanan non motorized. Sementara dari sisi tujuan, perjalanan ke tempat kerja sebanyak 5,6 juta perjalanan (32 persen) ke sekolah 5,3 juta (30 persen), berbelanja 2,1 juta (12 persen), tujuan bisnis 1,4 juta (8 persen) serta lain-lain 3,1 juta (18 persen). Data dari Pamintori juga mengungkapkan perjalanan dengan kendaraan ke tempat kerja tercatat sebanyak 48 persen, ke sekolah 14 persen, tempat belanja 12 persen, bisnis 8 persen, lain-lain 18 persen.

Dari penjelasan tersebut nampak kepala sekolah sebagai bagian dari gugusan kekuasaan lokal sedang bekerja mereproduksi kekuasaan dengan menyampaikan perubahan jadwal itu dan menegaskan “...*ini sudah peraturan pemerintah daerah*”. Kalimat ini muncul sebagai wujud dari kekuasaan simbolik.

Adanya orang tua peserta didik yang komplain dan penuturan dari kepala sekolah bahwa“...*ini sudah peraturan pemerintah daerah*” merupakan pertarungan simbolik. Pertarungan simbolik adalah sebuah persaingan untuk kekuasaan atas pelaku sosial yang lain, atas eksistensinya, pandangannya, persepsinya, dan apresiasinya. Penyebabnya adalah perbedaan pandangan dunia (*world view*), perbedaan sudut pandang, dan perbedaan nilai-nilai. Tujuan dari pertarungan simbolik ini adalah untuk mendapatkan kekuasaan memproduksi dan menunjukkan pandangan dunia yang paling diakui, yang paling dianggap benar, yang memiliki legitimitas.

Bagaimana tanggapan orang tua peserta didik terhadap pergeseran jadwal tersebut, berikut adalah salah satu contohnya;

”Nah itu saya tidak setuju pisan. Merepotkan, bayangkan saya kan baru tidur jam 11 malam setelah pekerjaan rumah saya beres, trus harus sudah bangun jam 3 pagi, masak, nyiapin ini itu repot banget. Kalau orang tua oke lah bangun pagi tapi kalau anak-anak kan kasian. Kalau dibangunkan, anak saya suka bilang masih ngantuk Mah. Menurut saya sih harusnya orang yang kerja aja yang disuruh pagi berangkatnya jangan ngorbanin anak-anak. Tapi ya sudahlah kita harus taat pada peraturan pemerintah. Kan kalau ingin jadi orang baik harus taat pada tiga aturan; aturan adat, aturan pemerintah sama aturan agama. Ya kita taat aja sama aturan pemerintah, mau gimana lagi”.

Kalimat “...*ya kita taat aja sama aturan pemerintah, mau gimana lagi*” merupakan indikasi *hetrodoxa* dari pertarungan simbolik yang berlangsung. Menurut Bourdieu, dalam pertarungan simbolik terjadi pertarungan wacana. Wacana yang menang menjadi dominan; *doxa*, sedang wacana yang kalah menjadi *hetrodoxa*.

4.1.2.2. Implikasi bagi Peserta Didik



Gambar 4.3. Sarapan nasi bungkus di kelas

Pagi itu saya menuju kelas tiga yang masih lengang, ada anak laki-laki yang membawa tas plastik hitam, duduk di kursi belakang dan mengeluarkan wadah makanan berwarna biru, di dalamnya ada bubur kemudian ia memakannya. “Sarapan ya Nak?” sapa saya “Iya Bu, ga sempat sekarang sarapan di rumah, jadi dibawa ke sekolah aja sarapannya”. Kemudian muncul empat anak perempuan “Kalian sudah sarapan Nak?” tanya saya, mereka menjawab serempak “Belum”, “Sudah”. Saya lanjut bertanya “Ayo siapa yang sudah sarapan angkat tangan” dua anak angkat tangan “Sarapannya sama apa sayang?”. “sama mie goreng”, “Kalau aku sama roti, mama tidak sempat bikin nasi”. “Ya bagus sudah sarapan, kalian mengapa tidak sarapan?” tanya saya pada dua anak lagi. “Takut kesiangan” jawab salah satu anak. Anak yang satu lagi menjawab “Nanti sarapannya jam istirahat saja”. “O ya, jam istirahatnya jam berapa Nak?”. “Jam setengah sembilan”. “Kalau istirahat, jajannya apa?”. “Chiki”. “Ibu mau tanya lagi, menurutmu lebih enak masuk jam berapa sekolah?” “Jam tujuh Bu”. “Mengapa lebih enak jam tujuh?”. “Sebab kalau terlalu pagi, suka ngantuk di kelas”. Tiba-tiba ada anak laki-laki masuk menghampiri “Namamu siapa Nak?”. “Dani”. “Sudah sarapan?”. “Sudah, minum susu aja Bu”. “Ya bagus, semua anak-anak kalau bisa usahakan sarapan dulu sebelum berangkat sekolah, tuh ada tulisan itu” saya menunjuk tulisan yang menempel di dinding yang berbunyi “Lets Breakfast”. Saya kemudian masuk ke kelas dua ada beberapa anak di sana, sedang bercengkrama, “Pagi anak-anak, apakah kalian sudah sarapan” mereka serempak menjawab; ada yang jawab sudah ada yang menjawab belum.

Dari gambaran di atas, perubahan jadwal masuk sekolah bagi peserta didik menyebabkan pola makan yang berubah dari nasi ke mie goreng atau ke roti atau minum susu saja. Ada juga yang mengubah kebiasaan sarapan di rumah menjadi sarapan di sekolah membawa bekal makanan atau nasi bungkus. Ada juga yang

menunda sarapan pada jam istirahat, namun sayang peserta didik belum dapat memilih sarapan yang baik untuknya. Perubahan pola makan ini adalah cara yang dilakukan peserta didik dalam menyalasi pergeseran jadwal yang terjadi.

Selain perubahan pola makan, dari fieldnote diatas juga dapat tergambar adanya peserta didik yang lebih menyukai masuk sekolah jam 07 pagi karena jika terlalu pagi ia mengantuk di kelas. Pengakuan anak ini sejalan dengan keterangan dari guru "Saya pernah masuk di kelas tiga menggantikan guru agama, ada anak yang tidur pada jam pertama, jadi saya suruh ia cuci muka"(Ibu Zahroh) .

Namun di sisi lain ada peserta didik yang menyukai sekolah masuk jam 06.30 "Saya senang masuk jam 6.30, karena pulang bisa lebih cepat " kata Seli. "Aku juga suka jam 6.30 jadi bangun pagi, sholat subuh tidak kesiangan" jelas Okta.

Adanya pergeseran jadwal masuk sekolah juga menyebabkan adanya peserta didik yang terlambat masuk sekolah;

"Minggu pertama banyak yang terlambat, hari pertama saya masuk di kelas 2 dari 40 anak ada 5 yang terlambat , minggu kedua sudah lumayan. Ini ada catatannya untuk minggu pertama dan kedua. Catatan ini harus di fax ke Kasi pendidikan kecamatan"

Berikut ini adalah tabel rekap absensi yang ditandatangani pada tanggal 10 Januari dan 17 Januari 2009.

Tabel 4.1. Rekapitulasi Absensi Siswa dan Guru pada Minggu Pertama

| No | Hari | Siswa | | | | | Guru | | | | |
|--------|--------|-------|----|----|----|------|------|---|---|----|------|
| | | S | I | A | T | Jmlh | S | I | A | T | Jmlh |
| 1 | Senin | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 | - | - | - | 3 | 3 |
| 2 | Selasa | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | - | - | - | 2 | 2 |
| 3 | Rabu | 5 | 1 | 1 | 8 | 15 | - | - | - | 1 | 1 |
| 4 | Kamis | 10 | 1 | - | 4 | 15 | - | - | - | 2 | 2 |
| 5 | Jumat | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | - | - | - | - | - |
| 6 | Sabtu | 8 | 5 | 5 | 7 | 25 | - | - | - | 3 | 3 |
| Jumlah | | 37 | 13 | 12 | 40 | 102 | - | - | - | 11 | 11 |

Ket: S=Sakit, I=Izin, A=Alfa, T=Terlambat

Tabel di atas adalah rekap absensi minggu pertama saat diberlakukan perubahan jadwal masuk sekolah. Sedangkan rekap absensi pada minggu kedua dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini;

Tabel 4.2. Rekapitulasi Absensi Siswa dan Guru pada Minggu Kedua

| No | Hari | Siswa | | | | | Guru | | | | |
|--------|--------|-------|----|----|---|------|------|---|---|---|------|
| | | S | I | A | T | Jmlh | S | I | A | T | Jmlh |
| 1 | Senin | 4 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 2 | Selasa | 6 | 4 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 3 | Rabu | 4 | 1 | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 4 | Kamis | 9 | 1 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 5 | Jumat | 6 | 2 | 5 | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 6 | Sabtu | 6 | 1 | 2 | - | 9 | 1 | 2 | - | - | - |
| Jumlah | | 35 | 10 | 15 | - | 60 | 1 | 2 | - | - | 3 |

Ket: S=Sakit, I=Izin, A=Alfa, T=Terlambat

Dari tabel 4.1 nampak terdapat 102 peserta didik yang terlambat dalam satu minggu dan ada 11 guru yang terlambat dalam satu minggu pertama, namun pada tabel 4.2 di minggu kedua terlihat tidak ada satu pun yang terlambat baik peserta didik maupun guru. Namun dari wawancara dengan salah satu guru dapat diketahui bahwa masih ada peserta didik yang terlambat pada minggu keempat;

“Beberapa dari mereka yang terlambat, bahkan sampai sekarang satu anak masih terlambat, saya sudah bilang pada anak itu bila sekali lagi terlambat tidak usah masuk, pulang saja. Biasanya anak yang terlambat lima belas menit tidak boleh masuk kelas pada jam pelajaran pertama, jadi ia harus nunggu satu jam pelajaran di luar kelas”.

Laporan dalam bentuk rekapitulasi yang terlambat masuk sekolah merupakan mekanisme pendisiplinan yang dilakukan oleh pengawas terhadap sekolah-sekolah yang diawasinya. Mekanisme ini di sekolah melahirkan kebijakan *punishment* bagi yang terlambat. *Punishment* bagi yang terlambat yang dikemukakan guru sejalan dengan yang dikemukakan oleh kepala sekolah sebagai berikut;

“Yang belum terlanjur masuk menunggu di luar gerbang, yang sudah masuk gerbang nunggu di luar kelas. Yang terlambat tidak boleh ikut jam pelajaran pertama. Peraturan yang terlambat kami berlakukan sama baik guru ataupun siswa. Bila hari senin terlambat tidak boleh masuk gerbang”.

Hal ini juga senada dikemukakan oleh peserta didik;

”Ada teman yang kesiangan, tapi boleh masuk karena pelajaran belum dimulai. Bila pelajaran sudah dimulai, tidak boleh masuk kelas menunggu satu jam pelajaran”, Aldi memberi penjelasan. “Kalau upacara kesiangan itu tidak boleh masuk halaman, kan

pintu gerbangnya dikunci, menunggu di luar dulu sampai upacara selesai”.

Punishment ini diberlakukan oleh guru dan kepala sekolah sebagai “*micro pouvoirs*” untuk membangun disiplin agar tidak terlambat lagi, agar peraturan baru bisa ditegakkan. Dalam hal ini nampak bahwa tubuh senantiasa menjadi sasaran ‘kuasa’ dalam arti ‘teknik politis’ yang mau mengatur, mengontrol atau mengoreksi segala aktivitas tubuh. Menurut Foucault; kuasa, dari masa yang satu ke masa yang lain, selalu menyentuh tubuh, hanya cara, ukuran dan sasaran kontrolnya saja yang senantiasa berubah-ubah. Foucault menyebut usahanya sebagai ‘studi perubahan model strategi menghukum’ dengan berpangkal pada penelusuran “teknologi politis terhadap tubuh”. Teknologi politis terhadap tubuh akhirnya sampai pada “perhatian” terhadap tubuh yang tadinya harus disiksa – sampai pada tubuh yang harus dilatih agar disiplin. Bentuk ini merupakan “penghargaan” terhadap tubuh.

Pendisiplinan bagi peserta didik juga guru dan karyawan lainnya terlihat dari papan -papan pendisiplinan yang tergantung di langit-langit koridor sekolah. Papan pendisiplinan tersebut berbunyi “Disiplin adalah jalan menuju kesuksesan” dan “Saya malu jika datang terlambat ke sekolah” . Papan ini adalah bentuk persuasif terhadap tubuh agar berperilaku disiplin. Setiap hari peserta didik maupun guru dapat membaca papan-papan ini. Dengan demikian isi dari tulisan itu masuk ke alam bawah sadar sehingga membentuk tubuh menjadi disiplin.



Gambar 4.4. Papan pendisiplinan tergantung di koridor sekolah



Gambar 4.5. Papan pendisiplinan tergantung di koridor sekolah

4.1.2.3. Implikasi bagi Guru

Perubahan jadwal masuk sekolah juga berpengaruh kepada guru. Pada laporan rekapitulasi menunjukkan pada minggu pertama saat peraturan itu diberlakukan dilaporkan ada 11 yang terlambat. Agar tidak terlambat lagi kepala sekolah memberlakukan punishment untuk guru sama dengan murid yakni tidak boleh masuk mengajar pada jam pertama, dan bila terlambat pada hari senin saat upacara maka tidak boleh masuk gerbang sekolah, menunggu sampai upacara selesai dilakukan.



Gambar 4.6. Guru sedang sarapan pagi di sekolah

Para guru menyiasati dengan membeli makanan siap makan dan membawa sarapan itu ke sekolah. Pukul 6.25 Bu Al datang membawa tas plastik hitam ia mengeluarkan makanan satu bungkus nasi uduk yang dibungkus kertas dan beberapa kue gemblong “*Sarapan dulu yuk Bu Heni, saya belum sempat sarapan nih*”. “*Ya terima kasih*”, saya mengambil tustel dan memotret Bu Al yang sedang

sarapan ditemani BuIna. *“Nih aku juga bawa bekal kata Bu Ina sambil mengeluarkan tas plastik hitam yang isinya kue basah”*. Tiba-tiba ada Bu Yani masuk sambil berkata *”Tuh ada Bunda datang”*. Bu Al dan Bu Ina berhenti makan dan memasukan dengan tergesa-gesa semua makanan dalam tasnya. *”Udah dulu ah makannya ga enak ada Bunda”* kata Bu Al.

Kejadian ini menunjukkan betapa hegemoni kepala sekolah yang begitu besar terhadap guru. Para guru dalam hal ini sebagai kelompok yang dikuasai tidak dipaksa dengan kekuatan koersi, melainkan mereka secara sukarela menyetujui penerapan kuasa penguasa atas dirinya (hegemoni sebagai konsensus).

Hal ini juga menunjukkan bahwa pigura besar yang tertempel di atas pintu ruangan guru yang berisi disiplin yang harus dilakukan oleh guru telah bekerja secara efektif diinternalisasi oleh guru. Dalam poin tiga tercantum ‘Siap Menjalankan Tugas’ dan pada poin kedelapan tercantum ‘Norma-Norma Jangan Dilanggar’. Guru makan di ruang guru beberapa menit sebelum mengajar dapat diinterpretasikan belum siap menjalankan tugas. Begitu pula ketika guru makan sedangkan kepala sekolah tidak makan, hal ini bisa diinterpretasikan melanggar norma kesopanan. Dengan demikian langkah yang diambil oleh guru adalah menghentikan makan dan menghapus jejak makanan itu dengan memasukkannya secara tergesa-gesa ke dalam tas, ini adalah bentuk disiplin tubuh yang dilakukan sukarela.

4.2. Sekolah Gratis

Kebijakan Pemerintah DKI menggratiskan biaya pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri telah dimulai pada tahun 2006. Biaya pendidikan ini dikenal dengan nama BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOP (bantuan Operasional Pendidikan) yang tiap tahun mengalami kenaikan. BOP adalah biaya pendidikan yang berasal dari APBD DKI Jakarta yang diberikan kepada semua SDN, MIN, SMPN, MTSN di DKI Jakarta. Pada tahun ajaran 2007/2008 besarnya Rp. 50.000 per siswa setiap bulannya untuk tingkat SD dan Rp. 100.000 per siswa setiap bulannya untuk tingkat SMP. Pada tahun ajaran 2008/2009 dana BOP memberi bantuan sebesar Rp60.000 perbulan bagi siswa SD dan Rp110.000 untuk siswa SMP perbulan persiswa. BOS adalah bantuan Pendidikan yang berasal APBN (Pusat) kepada SD, MI, SMP, dan MTs yang mengajukan permohonan di seluruh Indonesia. Besarnya Rp. 20.000 per siswa setiap bulannya untuk siswa SD atau MI dan Rp. 25.000 per siswa setiap bulan untuk siswa SMP atau MTS.

BOS dan BOP telah dikururkan. Bahkan, khusus untuk di wilayah Jakarta telah dikeluarkan surat edaran Nomor 18/SE/2007 dari Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 November 2007 yang ditujukan kepada para kepala sekolah SDN dan SMPN di Lingkungan Dinas Pendidikan Dasar. Surat edaran tersebut mengatur tentang tidak dibolehkan melakukan pungutan di sejumlah item pendidikan, di antaranya menyangkut buku, pakaian seragam serta berbagai sumbangan resmi lainnya.

Berkaitan dengan dana BOS dan BOP Bapak Sukesti Martono saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) mengatakan;

“Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sekolah dalam pengelolaan dana BOP/BOS dan yang berasal dari bantuan masyarakat atau perusahaan. Misalnya, sekolah wajib untuk menginformasikan pada seluruh masyarakat. Sehingga para komite sekolah, LSM, dan masyarakat luas dapat membaca rincian pemasukan dan pengeluaran dana yang tertuang dalam APBS sekolah. Selanjutnya, sekolah wajib mengoptimalkan penggunaan dana yang bersumber dari APBN / APBD dalam membiayai kebutuhan sekolah. Jangan lupa, SDN/SMPN/SLB wajib membebaskan biaya pendidikan bagi seluruh siswa yang terdaftar di sekolah yang bersangkutan. Komite sekolah dapat menerima sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari masyarakat. Kemudian, sumbangan sukarela dari masyarakat/perusahaan yang tidak mengikat dan tidak ada paksaan itu hendaknya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar pembiayaan APBD/APBDN. Terakhir, penggunaan dana yang berasal dari APBN/ APBD dan sumbangan masyarakat / perusahaan, harus dibukukan secara terpisah dan tidak dapat dialihkan dari satu sumber dana ke sumber lainnya. Jadi ada peruntukkannya masing-masing”

4.2.1. Implikasi BOS dan BOP terhadap Sekolah

Sebelum ada BOS Buku hubungan sekolah dengan penerbit buku memiliki hubungan yang saling menguntungkan, hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan kepala sekolah.

”Sekarang susah kita menerima buku dari penerbit setelah ada BOS buku. Dulu waktu belum ada, kita bisa bargaining dengan penerbit. Kalau ada penerbit yang datang kita bisa bilang 'OK kita tahu buku mana yang bagus, kalau kita mau pake punya anda apa kontribusi anda untuk sekolah? Dulu itu kita tidak punya kursi untuk di ruang guru. Guru duduk pakai kursi anak, kemudian mereka (penerbit) ngedrop kursi untuk lima belas guru. Atau kita minta sarana audio visual, TV dan LCD, itu tergantung dari lamanya buku itu dipake. Kita kan bargaining juga untuk kepentingan sarana sekolah, kalau kita hanya

mengandalkan menunggu dari pemerintah, sampai jebol itu kursi mungkin baru dapat ”.

Dalam kebijakan sekolah gratis, dana yang diberikan adalah dana kebutuhan minimal, sehingga segala kebutuhan harus dihitung dan dicukupi dari dana tersebut. Bagi sekolah yang biasanya membutuhkan dana yang lebih besar dari dana minimal seperti sekolah ini, maka hal ini terasa sebagai suatu kemunduran. Pelayanan yang membutuhkan dana besar akan terhambat. Di sisi lain, akan menarik iuran untuk mencukupi kebutuhan jelas tidak diperbolehkan.

Berkaitan dengan konsep sekolah gratis, kepala sekolah juga menuturkan pengalamannya sebagai berikut;

“Yang menjadi kendala di sekolah ini adalah kebutuhan pemenuhan sarana yang masih harus antri, dengan orang tua masih harus sangat berhati-hati. Dulu sebelum ibu kan ada program pembuatan pendopo, katanya sudah sepakat orang tua siswa, ketika ibu menggantikan, ibu yang kena padahal Ibu hanya meneruskan program. Kan dengan adanya canangan pemerintah sekolah gratis, sekolah tidak boleh minta dana dari orang tua, ada orang tua yang sms ga tanggung-tanggung smsnya ke presiden, Ibu kena teguran. Makanya harus hati-hati sekali”.

Hal ini jelas menunjukkan implikasi dari konsep sekolah gratis yang digembarkan pemerintah menyebabkan pihak sekolah menjadi merasa kaku dalam bergerak. Wacana sekolah gratis ini bergulir dari pemerintah kemudian ditangkap oleh orang tua siswa dan dijadikan sebagai alat kekuasaan.

Sekali lagi dari sini terlihat pertautan antara pemikiran Foucault, Gramsci dan Bourdieu, antara pengetahuan dan kekuasaan, kekuasaan dan kekerasan, kekerasan simbolik dengan kekuasaan.

4.2.2. Berita atau Amplop

Kebijakan sekolah gratis mewajibkan sekolah untuk menginformasikan APBSnya pada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat luas dapat membaca rincian pemasukan dan pengeluaran dana yang tertuang dalam APBS sekolah. Kewajiban ini memberikan kekuatan dan kekuasaan kepada masyarakat untuk dapat mengontrol pendanaan sekolah. Namun pada gilirannya kewajiban ini pula mengundang pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakannya. Menurut Ibu Sumini pada tahun-tahun pertama setelah adanya kebijakan sekolah gratis,

seringkali sekolah ini didatangi oleh orang-orang yang mengaku dari LSM atau wartawan yang mengaku dari media massa tertentu. Berikut penuturan Ibu Sumini

”Dulu tahun-tahun pertama setelah ada BOP dan BOS, sering ada orang dari LSM atau dari wartawan tertentu yang koran ecek-ecek ga bonafid datang kesini menanyakan ini itu soal pendanaan sekolah. Biasanya kepala sekolah yang dulu suka ngasih amplop kalau mereka datang. Saya pikir mereka itu datang ke sini bukan nyari berita tapi nyari amplop. Eh nyari isi amplop he he he. Tapi kepala sekolah yang sekarang bagus, tegas, tidak pernah ngasih amplop, sama pengawas pun tidak pernah ngasih amplop, beda dengan kepala sekolah yang lain. Bagus yang ini kepala sekolahnya bener. Jadi sekarang tidak ada lagi wartawan yang datang ke sini kapok barangkali tidak dapat amplop”.

Hal ini menunjukkan kemenangan kepala sekolah dalam perang posisi dengan oknum-oknum yang hanya ingin mengambil keuntungan dari kebijakan yang digulirkan. Kepala sekolah yang tegas dan bersih sangat diperlukan dalam memanje jalannya roda penyelenggaraan sekolah.

4.2.3. Menyiasati BOS Buku

Pihak sekolah dan orang tua murid di sekolah ini memandang beli buku sendiri lebih efektif dibandingkan dengan BOS buku. Hal ini dituturkan oleh kepala sekolah sebagai berikut;

”Kalau menurut orang tua peserta didik lebih baik seperti dulu sebab kalau sekarang buku hanya dipinjamkan pada anak, ada konsekuensinya juga, kalau hilang diganti dengan yang sama, tidak boleh dicurat-corek jadi anak tidak leluasa terhadap buku. Mereka punya usul mengkopi semua buku untuk dimiliki anak-anaknya. Saya ya hanya memberikan pinjam semua buku biar mereka secara kolektif mengkopi sendiri. Itu kan usul dari mereka sendiri. Jadi kita ini hanya mengikuti aturan yang ada jangan sampai menyalahi tapi menyiasati bagaimana sebaiknya sesuai dengan kebutuhan di lapangan”.

Salah satu orang tua peserta didik mengatakan

“Bagi saya sama saja ada BOS Buku atau tidak karena kita pasti akan mengkopi buku itu lagi karena kesian sama anak, biar anak ada buku pegangan. Tapi bagi yang lain mungkin beda karena bisa pinjam buku pelajaran dari sekolah tidak usah beli, tapi harus hati-hati bukunya tidak boleh kotor”

4.3. Perubahan Kurikulum

Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan atau KTSP di Wilayah DKI Jakarta harus sudah diterapkan pada tahun 2006. Wilayah Jakarta diharapkan dapat menerapkan kurikulum baru

tersebut terlebih dahulu dibandingkan dengan wilayah lainnya (tahun ajaran 2010/2011) karena Jakarta dianggap sebagai barometer karena dekat dengan pusat. Implikasi kebijakan tersebut di SD Lebak Bulus 06 dapat dilihat gambarannya sebagai berikut;

4.3.1. Kompetensi untuk Kompetisi

Ketika para guru sedang beristirahat di ruang guru saya melontarkan sebuah pertanyaan bagaimana pendapat ibu dengan adanya perubahan kurikulum dari kurikulum 2004 ke KTSP? salah satu guru mengatakan

”Kurikulum KBK 2004 belum tuntas diterapkan dengan baik sudah diubah lagi menjadi KTSP, kami yang dilapangan walaupun repot ya harus ikut, tidak bisa tidak. Saya juga pada awalnya bertanya mengapa ada perubahan lagi, tapi mungkin tujuannya sih baik agar kita bisa berkembang terus menjadi lebih baik dan tidak tertinggal dengan negara lain ” (Ibu Saliah).

Kata *“walaupun repot ya harus ikut, tidak bisa tidak”* pada kalimat diatas mengandung makna adanya hegemoni tertentu. Guru sebagai kelompok yang dikuasai tidak dipaksa dengan kekuatan koersi, melainkan mereka secara sukarela menyetujui penerapan kuasa penguasa atas dirinya (hegemoni sebagai konsensus).

Sebelum penerapan kurikulum baru (KTSP) tersebut ada sosialisasi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang mulai dilakukan di tingkat pusat, dinas pendidikan kota, dinas pendidikan kecamatan sampai di tingkat gugus dan rapat tingkat sekolah. Sosialisasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa ide-ide dari kebijakan itu diinternalisasi oleh pihak yang dikuasai. Internalisasi ide tersebut diperlukan agar ide dan kepentingan dari pembuat kebijakan tidak ditentang, sehingga penguasaan terhadap mereka menjadi sesuatu yang *“legitimated”* dan nampak wajar.

Sedangkan guru yang lain ketika ditanyai tentang KTSP mengatakan;

”Perubahan kurikulum itu dilakukan agar kita mengajar lebih terfokus pada pencapaian kompetensi siswa. Kan kalau di kurikulum 2004 kita tidak terlalu fokus pada kompetensi siswa sedangkan di KTSP kita harus benar-benar memperhatikan kompetensi yang dicapai oleh siswa” (Ibu Ina) .

Beberapa pendapat guru, dari pertanyaan yang saya lontarkan di atas tidak ada yang mengarah pada proses perubahan paradigma dari sentralisasi pendidikan kepada desentralisasi pendidikan. Perubahan paradigma ini yang pada akhirnya mengantarkan pada keharusan

mengubah kurikulum yang sentralistik pada kurikulum yang desentralistik. Saya berpikir dimungkinkan didalam sosialisasi yang telah dilakukan lebih menekankan pada perlunya menghasilkan output yang memiliki kompetensi tinggi sehingga dapat bersaing dengan negara lain. Hal ini menunjukkan persaingan bebas yang merupakan inti dari neoliberalisme telah menjadi dasar dari kebijakan perubahan kurikulum.

4.3.2. KTSP versus KTSW

Bila melihat dokumen kurikulum yang dimiliki oleh sekolah, akan muncul gambaran bahwa dokumen KTSP tidak terhimpun dengan baik. Menurut ketentuan BSNP, KTSP itu terdiri dari 2 dokumen yakni dokumen satu yang terdiri dari dan dokumen dua yang terdiri dari silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau bisa juga silabus dan RPP ini merupakan lampiran dari dokumen satu. Di sekolah ini, dokumen satu terhimpun dengan baik namun dokumen dua terpecah-pecah ke dalam silabus-silabus mata pelajaran dan di pegang oleh guru masing-masing.

Ketika saya tanyakan tentang proses pembuatan KTSP ini, seorang guru senior mengatakan *"Kami membuatnya bersama-sama"*. Saya kemudian menanyakan hal yang sama kepada guru yang lebih muda yang tercantum sebagai sekretaris dalam pembuatan KTSP tersebut, ia menjelaskan sebagai berikut; *"Waktu itu yang membuat dokumen satu adalah kepala sekolah, saya membantu edit dan pengetikan saja, sedangkan untuk silabus kami membuatnya rame rame satu wilayah. Di kecamatan Cilandak ada 14 wilayah, setiap wilayah terdiri dari sepuluh sekolah yang berdekatan"*. (Ibu Siti)

Saya kemudian menanyakan kembali pada guru yang lain tentang pembuatan KTSP, guru itu menjawab *"Bila yang ini kepala sekolah yang membuat, kata Ibu Zahro sambil menunjuk dokumen satu yang sedang saya pegang, guru-guru yang membuat silabus di wilayah, kalau RPP dibuat sendiri di masing –masing sekolah"*. (Ibu Zahro) . Saya kemudian berkelakar *"Jadi kalau begitu secara keseluruhan bukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dong"*. Beberapa guru yang hadir di situ tertawa *"Iya ya lebih tepat Kurikulum Tingkat Satuan Wilayah, KTSW"* Ibu Ina mengemukakan pendapatnya. Kemudian Ibu Suminah berargumen *"Begini Bu masalahnya, waktu kita sangat sedikit, sedangkan kita harus segera menuntaskan pembuatan KTSP karena akan segera diberlakukan, padahal tidak semua guru paham betul cara menyusun"*

silabus pada waktu itu, nah itulah cara cepat dan tepat yang kami lakukan. Kami melihat contoh dari pusat kemudian kami adaptasi rame-rame di wilayah”.

Hal ini menunjukkan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di lapangan menggambarkan sebuah proses kebijakan yang tergesa-gesa dan ketidakmampuan sumber daya manusia pendukungnya.

4.3.3. Agen Globalisasi Membidani KTSP

Sebenarnya lahirnya kebijakan penggunaan KTSP ini merupakan rangkaian proses yang panjang dan tidak terlepas dari pengaruh global. Rangkaian proses ini bisa dirunut paling tidak dari tahun 1998. Supriyadi dan Jalal (2001) menyatakan pada tanggal 23 September 1998 telah terbit laporan Bank Dunia yang bertajuk *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery*. Laporan itu menunjukkan bahwa selama beberapa dasawarsa terakhir, pendidikan di Indonesia mengalami kendala besar dan serius, satu diantaranya menyangkut manajemen pendidikan yang sentralistik, terutama yang berkaitan dengan penentuan program, perencanaan dan pembiayaan pendidikan.

Kemudian Pada tanggal 4 November 1998, Bappenas memprakarsai pertemuan untuk membahas laporan Bank Dunia. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang bagaimana laporan penelitian Bank dunia beserta rekomendasi-rekomendasinya ditelaah, dikaji dan dijadikan landasan dalam pembangunan pendidikan Indonesia di masa depan. Maka dibentuklah lima kelompok kerja yaitu 1) *Framework of Educational Reform*, 2) *Quality of Basic Education: School-Based Management and Desentralization*, 3) *School Personnel Development (teachers and Educational Staffs)*, 4) *Higher Education: The Implementation of New Paradigm* dan 5) *Community-Based Education and Partnership of Private and Public Education*. Setelah bekerja sekitar lima bulan, Pokja menghasilkan draft laporan yang dipresentasikan dalam sidang pleno di Bappenas pada bulan Januari 1999 yang dihadiri oleh wakil-wakil Bank Dunia dan sejumlah badan internasional di Indonesia. Kegiatan ini disusul dengan konferensi tentang pendidikan di Indonesia pada 23-25 Februari 1999 yang dihadiri oleh 700 peserta yang dihadiri oleh departemen pemerintah, Bappenas, lembaga-lembaga donor (World Bank, ADB, Aus AID, JICA), perguruan tinggi, utusan pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota, LSM dan intelektual. Dari Konferensi ini dihasilkan sejumlah rekomendasi yang kemudian menjadi masukan dalam pengembangan kebijakan di bidang pendidikan dalam konteks otonomi daerah.

Kelemahan sistem sentralisasi yang diimagekan sebagai problem dalam pembangunan dan otonomi daerah yang dicitrakan sebagai jalan keluar, kemudian menjadi pembicaraan yang hangat di sana-sini dalam berbagai diskusi dan seminar. Ketika wacana itu berkembang munculah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2001 yang secara politis mereduksi peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan administrasi dan memberikan peran besar kepada pemerintah daerah dalam berbagai hal termasuk pendidikan¹ (Syaukani, 2001). Hal ini jelas menunjukkan lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tidak terlepas dari pengaruh global dalam hal ini *World Bank* sebagai lembaga donor, ia adalah salah satu agen globalisasi.

Proses rangkaian panjang ini mengingatkan pada catatan artikel Escobar tentang relevansi karya Foucault bagi kajian Dunia Ketiga, bahwa sekurang-kurangnya ada tiga strategi utama lewat mana doktrin dan teori pembangunan dianggap berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan disiplin, yaitu mekanisme normalisasi. Strategi pertama disebut "*inkorporasi progresif problem*", yaitu teori-teori dan doktrin-doktrin pembangunan memuat berbagai problem yang harus mereka sembuhkan, artinya munculnya teori dan doktrin tersebut didahului dengan penciptaan problem pembangunan, yaitu "*abnormalisasi*", dan mereka selipkan dalam domain pembangunan, sehingga memberikan justifikasi bagi para penentu kebijakan dan ilmuwan Negara Barat untuk melibatkan dan mencampuri urusan domestik negara Dunia Ketiga. Dalam hal ini titik kelemahan sistem sentralisasi merupakan problem yang harus disembuhkan.

Strategi kedua disebut "*profesionalisasi pembangunan*", yaitu problem pembangunan atau abnormalisasi setelah dimasukkan ke dalam domain pembangunan, maka menjadi masalah teknis dan terlepas dari persoalan politis, sehingga dianggap lebih bebas nilai dan merupakan bahan penelitian ilmiah. Dengan demikian problem pembangunan telah diprofesionalisasi melalui kontrol pengetahuan.

¹ Otonomi daerah dalam bidang pendidikan yang melahirkan reformasi di bidang pendidikan, pada gilirannya mendorong lahirnya perangkat perundang-undangan yang baru antara lain UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 mengamankan tersusunnya kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu kepada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Strategi ketiga disebut “institusionalisasi pembangunan”, yaitu doktrin-doktrin dan teori-teori pembangunan diberlakukan untuk berbagai level organisasi atau institusi, baik lokal, nasional maupun internasional, dan kesemua itu merupakan jaringan dimana hubungan baru kekuasaan pengetahuan telah terjalin dengan rapi dan sangat kuat. Ketiga strategi tersebut menunjukkan bagaimana pemberlakuan doktrin-doktrin dan teori-teori pembangunan sebenarnya hanya untuk melayani kepentingan Negara Barat (Amerika Serikat) sebagai kekuasaan hegemoni dalam tatanan internasional pasca Perang Dunia Kedua dan bukan untuk kepentingan negara-negara Dunia Ketiga yang menjadi sasaran doktrin-doktrin dan teori-teori pembangunan tersebut.

4.4. Pembelajaran ICT

Pembelajaran ICT di SD Lebak Bulus 06 baru diselenggarakan pada tahun ajaran 2008/2009 berikut penuturan kepala sekolah “*Baru tahun ini kami punya laboratorium IT, kami punya 11 unit komputer. Mengapa mata pelajaran IT diadakan? Ini kan era global yang tidak pakai IT bagaimana? Ya ketinggalan*”. Penuturan tersebut menyiratkan bahwa penggunaan komputer sangat erat kaitannya dengan era global².

4.4.1. Lahirnya Kebijakan Pembelajaran IT

Kebijakan tentang diselenggarakannya mata pelajaran IT sudah dirintis sejak tahun 2007. Dirjen Dikdasmen Depdiknas Prof Suyanto Ph.D mengatakan, program telekomunikasi dalam bentuk teknologi informasi komunikasi (TIK) atau *Information Communication and Technology* (ICT) merupakan program nasional yang penerapannya kini digunakan sebagai media pembelajaran. Hal itu karena ICT termasuk komponen standar sarana dan prasarana pendidikan dari kedelapan komponen SNP yang harus dipenuhi sekolah untuk menuju sekolah kategori mandiri dan sekolah bertaraf internasional yang saat ini sedang dirintis di seluruh Indonesia mulai 2007.

Program pemanfaatan dan penggunaan telekomunikasi tersebut juga telah diamanatkan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni dalam pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan media lain. Untuk itu,

² Budiman dalam bukunya *Lubang Hitam Kebudayaan* menjelaskan globalisasi adalah bentuk imperialisme kebudayaan dengan instrumentnya 3M, Mc Donald (makanan), MTV (dunia hiburan) dan Macintosh (komputer).

berdasar penjabaran amanat tersebut dalam PP Nomor 19 tahun 2005 yakni untuk menunjang proses pembelajaran, maka dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga secara operasional ICT dijadikan sebagai mata pelajaran pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi.

Bila dirunut kebijakan tentang pembelajaran IT yang sedang trend di sekolah-sekolah ini adalah imbas masukan dari agen global. Pembelajaran IT telah diamanatkan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 dan dijabarkan dalam PP nomor 19 tahun 2005. Perangkat perundang-undangan itu kemudian disebarakan melalui sosialisasi dan diklat-diklat oleh “gugusan-gugusan kekuasaan lokal yang tersebar”. Sedangkan kedua perangkat perundang-undangan tersebut lahir dalam semangat otonomi daerah atau desentralisasi yang dihembuskan oleh World Bank pada waktu itu. Di sini nampak bahwa kekuasaan itu menyebar dimana-mana (*power is omnipresent*), meresap dalam seluruh jalinan relasi-relasi sosial, kekuasaan tidak berpusat pada individu-individu melainkan bekerja, beroperasi dalam konstruksi pengetahuan. Relasi kekuasaan tidak lagi tampil dalam ruang konkrit yang melibatkan aktivitas fisik. Ia beroperasi dalam sebuah ruang representasi yang menjadikan sumber daya simbol sebagai kekuatan abstrak untuk menciptakan kebenaran.

4.4.2. Menyiasati Pengadaan Komputer

Dengan adanya kebijakan pembelajaran IT tentu saja menuntut adanya sarana dan prasarana untuk mendukung kebijakan tersebut. Karena dana dari pemerintah tidak mencukupi untuk pengadaan komputer di sekolah. Maka kepala sekolah mengadakan rapat dengan komite sekolah serta perwakilan dari orang tua siswa. Dalam rapat tersebut kepala sekolah mensosialisasikan program sekolah untuk mengadakan pembelajaran IT dan menawarkan bekerja sama untuk pengadaan sarana komputernya. Komite sekolah dan perwakilan orang tua sepakat bahwa setiap kelas menyumbangkan komputer mengenai jumlah tergantung kemampuan orang tua siswa per kelas. Sedangkan instalasi listriknya ditanggung sekolah dari dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan).

Perwakilan kelas kemudian bergerak mengkoordinir orang tua siswa di tiap-tiap kelas. Akhirnya di ruang laboratorium pada bulan agustus 2008 telah tersedia komputer 12 unit komputer namun yang bisa dioperasikan hanya 11 unit.

Kepala sekolah memberikan kebebasan kepada orang tua siswa untuk menyumbang komputer sesuai dengan kemampuan masing-masing dan tidak mau mengumpulkan dana dalam bentuk uang untuk membeli komputer karena menarik uang dari orang tua siswa tidak diperbolehkan setelah adanya kebijakan sekolah gratis.

